

Menghitung Pendukung Jokowi di Sumbar

DENGAN melihat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU untuk Pemilu 2019 mendatang, muncul beberapa pertanyaan dari publik. Bisakah pasangan Joko Widodo dan



Asrinaldi A

Ketua Jurusan Ilmu Politik,
Unand/ Peneliti Spektrum Politika

Ma'ruf Amin mendapatkan suara maksimal dalam pemilu mendatang, khususnya di Sumbar? Bukankah Prabowo Subianto memiliki massa pendukung yang jelas di Sumbar, jika berkaca pada hasil Pemilu 2014 yang lalu? Bagaimana dengan pemilihan Sumbar yang berafiliasi kepada Muhammadiyah yang jumlahnya mayoritas? Apalagi wakil presiden yang dipilih Jokowi adalah KH Ma'ruf Amin yang notabeneanya berasal dari Nahdlatul Ulama? Tentu banyak lagi pertanyaan lain yang muncul mengingat Presiden Jokowi sebagai calon petahana memiliki sejarah kekalahan "telak" di provinsi ini.

Prospek Jokowi

Pemilu presiden/ wakil presiden tahun 2014 yang dilaksanakan empat tahun lalu memang menjadi catatan penting bagi Presiden Jokowi. Walaupun mampu menjadi pemenang dalam pemilu di tingkat nasional, namun Jokowi-JK kalah telak di Provinsi Sumbar ketika berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. Pasangan Jokowi-JK mendapatkan suara sebesar 23,08%. Sementara, Prabowo-Hatta Radjasa memperoleh suara sebanyak 76,92%. Jelas kekalahan ini mendapat perhatian khusus oleh tim pemenang Jokowi-JK. Sebab kekalahan di Sumbar ini cukup besar, jika dibandingkan dengan kekalahan di provinsi lain di Pulau Sumatera seperti Nangroe Aceh Darussalam, Riau dan Sumatera Selatan. Bahkan kekalahan telak pasangan Jokowi-JK yang hampir mendekati perolehan suara kekalahan di Sumbar hanya ada di Provinsi NTB dengan perolehan suara pasangan ini sebesar 27,55% berbanding 72,45% untuk pasangan Prabowo-Hatta.

Jika dikalkulasikan, jumlah pemilih Sumbar ini sebenarnya juga tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan suara keterpilihan pasangan calon presiden/ wakil presiden. Ini terlihat dari jumlah pemilih Sumbar sebanyak 3.611.395 atau 1,83% dari seluruh pemilih Indonesia. Walaupun begitu, bagi Presiden Jokowi, memasuki Sumbar sebagai salah satu daerah yang harus dimenangkan dalam pemilu mendatang jelas sangat penting. Ini menyangkut pembuktian Presiden Jokowi dan timnya bahwa masyarakat Sumbar adalah rasional dalam berpolitik. Selama ini, Presiden Jokowi memang diserang oleh kampanye hitam (*black campaign*) yang sebenarnya jauh dari apa yang dituduhkan kepadanya. Tudingannya jelas berdampak pada keterpilihan Jokowi yang sangat rendah pada Pemilu 2014 yang lalu. Karenanya tidak mengherankan apa yang di-

lakukan Presiden Jokowi meningkatkan program pembangunan di provinsi ini dua tahun terakhir adalah bagian dari keinginannya untuk mendapatkan dukungan masyarakat Sumbar.

Jelas program pembangunan yang dibuat ini adalah jawaban yang diberikan Presiden Jokowi terhadap tuduhan dan keraguan masyarakat Sumbar kepada dirinya. Mulai dari pengembangan kawasan pariwisata Mandeh di Pesisir Selatan, pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, renovasi seribu rumah gadang di Solok Selatan, penyelesaian Masjid Raya Sumbar dan bantuan lain yang tidak terekspose ke publik cukup banyak telah diberikan kepada masyarakat. Bahkan, baru-baru ini pemerintah pusat juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk penyelesaian akses jalan dari Solok Selatan ke Dharmasraya yang dijangka dilaksanakan pada tahun 2019. Jelas ini sesuatu yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Sumbar.

Bagi masyarakat Sumbar yang memiliki pertimbangan rasional, tentu program pembangunan ini menjadi salah satu dasar bagi mereka untuk memilih presiden ke depan. Apalagi dalam konteks pemilu di negara demokratis, ada konsep tentang evaluasi terhadap kinerja pemimpin yang terpilih. Jika pemimpin yang terpilih tidak pernah menepati janji dan gagal memenuhi aspirasi masyarakatnya, maka pada pemilu berikutnya pemimpin tersebut tidak akan dipilih masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Artinya, kinerja pembangunan yang telah ditunjukkan Presiden Jokowi membangun Sumbar selama ini, tentu akan menjadi pertimbangan penting bagi pemilih Sumbar ke depan. Karenanya tidak heran ada pendapat yang mengatakan kekalahan pada Pemilu 2014 saja tidak menjadi penghalang Presiden Jokowi untuk melaksanakan pembangunan di Sumbar, apalagi kalau Presiden Jokowi menang!

Dukungan Muhammadiyah?

Pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana dengan ke-

beradaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menjadi pilihan Jokowi notabenebenya adalah Nahdatul Ulama? Memang Muhammadiyah adalah ormas keagamaan yang besar di Sumbar. Dengan keanggotaan yang mayoritas tentu menjadi pertimbangan juga bagi partai politik untuk mengharapkan dukungan dari anggota ormas tersebut. Walaupun begitu, ada yang menarik dari elite Muhammadiyah yang mempraktikkan konsep *high politics*-nya. Pada tataran ini elite Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih siapa pasangan presiden/ wakil presiden yang disukainya.

Walaupun kita tahu, Partai Amanat Nasional (PAN) diidentikkan dengan partai warga Muhammadiyah telah memberikan dukungannya kepada Prabowo-Sandiaga Uno. Namun cukup banyak juga warga Muhammadiyah yang tidak berafiliasi kepada PAN. Adanya pendapat berbagai pihak yang menyatakan warga Muhammadiyah Sumbar mengalihkan dukungannya ke Prabowo karena Ma'ruf Amin adalah Nahdatul Ulama, saya pikir itu terlalu berlebihan. Justru di Sumbar dalam kontestasi pemilu presiden mendatang bukanlah pada persaingan antara Ma'ruf Amin dengan Sadiaga Uno. Tapi masih berkisar pada calon presidennya, yaitu antara sosok Jokowi dengan sosok Prabowo.

Sedikit banyaknya dengan realita yang ada saat ini, maka peta perolehan suara pada Pemilu 2019 mendatang cenderung akan berubah. Walaupun pemilih Prabowo dianggap masih akan mendominasi suara yang akan diperoleh, tentu tidak akan sebanyak yang diperoleh pada Pemilu 2014 lalu. Apalagi masyarakat Sumbar semakin tercerahkan dengan berbagai informasi terkait dengan prestasi yang dibuat pemerintah hari ini. Prestasi ini jelas akan berdampak pada penambahan suara Presiden Jokowi yang tentu akan terus melihat Sumbar sebagai bagian penting dari pelaksanaan agenda pembangunannya ke depan. (*)